

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM
(Studi di Kota Gorontalo)**

Oleh

ERLIZA NABILA

271 411 191

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I



Moh. Rusdianto Puluhulawa SH., M. Hum

NIP. 197011051997031001

PEMBIMBING II



Suwitno Y Imran, SH., MH

Nip. 198306222009121004

**Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



SUWITNO .Y. IMRAN SH.,MH

NIP 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM
(Studi di Kota Gorontalo)**

Oleh

ERLIZA NABILA

NIM: 271411191

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan dewan penguji pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juli 2018

Pukul : 14.00 WITA s/d Selesai

Komisi Penguji

1. **Lisnawati Badu SH.,MH**
Nip. 19690529 200501 2 001

(.....)

2. **Novendri Nggilu SH.,MH**
Nip. 19891127 201404 1 001

(.....)

3. **Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum**
Nip. 19701105 199703 1 001

(.....)

4. **Suwitno Imran, SH.,MH**
NIP. 198306222009121004

(.....)

Gorontalo, 25 Juli 2018

Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19701105 199703 1 001

A B S T R A K

Erliza Nabila, Nim 271411191, SKRIPSI, “Analisis Hukum Kedudukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai Wujud Perlindungan Hukum (Studi di Kota Gorontalo)” ,di bawah bimbingan Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum dan Suwitno Y Imran, SH.,MH

Skripsi ini membahas tentang bagaimana Analisis Hukum Kedudukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai Wujud Perlindungan Hukum di Kota Gorontalo dan Faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu di Kota Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian kerja waktu Tertentu dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh di Kota Gorontalo dan Faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu di Kota Gorontalo Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, tehnik pengumpulan data dengan cara prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kedudukan hukum antara pekerja dengan pengusaha dalam perjanjian kerja waktu tertentu pada hakikatnya sama antara hak dan kewajibannya sama, namun dalam hal perjanjian kerja kedudukan pengusaha jelas lebih tinggi daripada kedudukan pekerja hal ini dikarenakan perjanjian kontrak dibuat sepihak oleh pengusaha. Aturan hukum yang mengatur tentang PKWT justru tidak mempunyai kepastian hukum yang jelas bagi pekerja, banyak pasal yang bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia dan pengaturan hubungan industri. Oleh karena itu untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu sangat tidak mungkin akan terwujud. Kedua, Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu di Kota Gorontalo yaitu: (a) Kesengajaan pekerja yang tidak melapor pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi setempat; (b) Kesepakatan kerja bersama tidak mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja; (c) Hak-hak pekerja tidak sesuai dengan peraturan perundangan perusahaan; (d) Upah yang dibayarkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan UMP

Kata Kunci : Kedudukan, Perjanjian kerja waktu tertentu, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Nabila, Erliza. Student ID 271411191. Undergraduate Thesis. "Legal Analysis of Temporary Work Agreement as the Conceptualization of Protection Law (A Study at Gorontalo City)." Principal Supervisor: **Moh.Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum.** Co-supervisor: **Suwitno Y Imran, SH., MH.**

The objective of this research is to explore the legal analysis of temporary work agreement as the conceptualization of protection law in Gorontalo City and factors inhibiting the protection law of temporary workers.

This normative research employed several methods in collecting the data, such as inventory, identification of law, as well as classification and systematization of law according to the research problem.

The result shows that the legal position of both workers and employee, in terms of temporary work agreement, is equal. Still, the employee has a higher status than the workers as the agreement is made by the employee unilaterally. The law constituting temporary work agreement is somewhat vague for the workers; some of the articles contradict the constitution of the Republic of Indonesia and the law concerning industrial relationship. As a result, protection law for such workers is hardly to be conceptualized. Furthermore, factors inhibiting the protection law for temporary workers in Gorontalo City are (a) The intentions of workers who do not report to the local Investment, Ministry of Energy and Mineral Resources, and Transmigration Service; (b) Collective labor agreement does not conceptualize the protection law for workers; (c) Workers' rights are not in accordance with company regulations; (d) Wages paid by the company are not in accordance with the minimum wages.

Keywords: Position, Temporary Work Agreement, Protection Law

